

“Korupsi Dalam Pemilihan Kepala Daerah”

(Studi Pemilukada: Kota Jayapura, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Kampar, dan Provinsi Banten)

Pendahuluan

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung bertujuan untuk menumbuhkan demokrasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan di daerah. Kewenangan yang dimiliki masyarakat dalam memilih kepala daerahnya diharapkan tidak hanya digunakan untuk menentukan para pemimpin terbaik tapi juga menjadi alat kontrol agar penyelenggaraan daerah lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kenyataannya, sudah tujuh tahun sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2005, penyelenggaraan pemilukada masih mengecewakan dan jauh dari prinsip demokrasi. Salah satu penyebabnya adalah korupsi. Antara lain ditunjukkan oleh penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) untuk modal pemenangan pasangan calon terutama *incumbent*, *money politik*, dan suap kepada penyelenggara pemilu.

Selain itu, birokrasi pun dipolitisasi untuk kepentingan pemenangan pasangan calon. Mereka dijadikan sebagai tim pemenangan. Berbagai kewenangan yang dimiliki birokrasi terutama berkaitan dengan penggunaan anggaran dan penyelenggaraan pelayanan diarahkan untuk mendukung modal dan meningkatkan popularitas pasangan calon tertentu.

Atas dasar itu, *Indonesia Corruption Watch* melakukan riset evaluasi dan monitoring pemilukada di empat daerah yaitu Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Kota Jayapura, dan Kabupaten Kampar.

Riset evaluasi dilakukan di Kabupaten Pandeglang dan Kota Jayapura dengan menggunakan metoda kualitatif. Langkah-langkahnya diawali dengan penyusunan instrumen riset, mengumpulkan dokumen-dokumen terkait penyelenggaraan pemilukada, wawancara dengan aktivis dan tokoh kunci yang terlibat dalam pemilukada dan *focus group discussion*. Sedangkan monitoring dilakukan di Kabupaten Kampar dan Provinsi Banten. Langkah-langkahnya diawali dengan mengumpulkan dokumen pemilukada terutama laporan dana kampanye, melakukan pemantauan langsung, serta menelusuri penyumbang dan penggunaan dana-dana APBD dan APBN.

Gambaran Umum Pemilukada

Pemilukada di empat daerah yang dievaluasi dan monitoring sebagian besar disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK). Di Pandeglang dan Jayapura pemilukada diulang di semua tempat. Sedangkan di Banten, MK menolak gugatan pasangan calon Wahidin Halim dan Irna Narulita serta Jazuli Zuwaini dan Makmun Muzaki. Hanya Kabupaten Kampar yang pemilihannya tidak diwarnai sengketa.

Pemilukada di Pandeglang dilaksanakan pada 3 Oktober dan 26 Desember 2010 diikuti oleh enam pasangan calon, tiga diantaranya melalui jalur independen. Di Papua, pemilukada diikuti oleh tujuh pasangan calon, lima pasangan melalui partai, dua lewat jalur independen. Pelaksanaannya pada 11 Oktober 2010 dan 18 Mei 2011. Rentang waktu yang lama antara pemilihan putaran pertama dengan putaran ulang disebabkan oleh masalah dalam penyelenggara, Anggota KPU dan Panwas berurusan dengan hukum karena terlibat korupsi. Sedangkan di Kampar pemilukada dilaksanakan pada 10 Oktober 2011 hanya diikuti oleh tiga pasangan calon. Ketiganya menggunakan partai politik sebagai kendaraan. Begitu pula di Provinsi Banten. Pemilukada diselenggarakan pada 22 Oktober 2011 diikuti oleh tiga pasangan calon yang menggunakan partai politik untuk bertarung.

Tabel 1. Gambaran umum pemilukada di empat daerah

Daerah	waktu	Peserta pemilukada	Keterangan
Pandeglang	3 Okt dan 26 des 2010	6 pasangan calon (3 melalui partai , 3 calon independen)	Dua kali sengketa pemilukada di MK. Putusan pertama MK memutuskan Pilkada ulang. Putusan kedua menguatkan keputusan KPUD.
Jayapura	11 Oktober 2010 dan 18 mei 2011	7 pasangan calon (5 jalur partai, 2 independen)	Sengketa pemilukada MK. Putusan pertama, pemilukada diulang .
Kampar	10 Oktober	3 pasangan calon (ketiganya menggunakan jalur partai)	Tidak ada sengketa .
Banten	22 Oktober 2011	3 pasangan calon (ketiganya menggunakan jalur partai)	Sengketa pemilukada di MK. Putusan MK menguatkan keputusan KPUD.

Hasil Riset Evaluasi dan Monitoring

Pemilukada dan Pertarungan Elit Daerah

Tujuan awal pemilukada secara langsung untuk membuka ruang bagi semua orang, terutama yang memiliki integritas dan kemampuan mengelola pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat ternyata tidak sepenuhnya terwujud. Pemilukada justru menjadi ajang bagi elit daerah untuk memperebutkan atau memperluas kekuasaan dalam upaya mengamankan kepentingan ekonomi.

Mereka yang memiliki modal besar dan akses pada kekuasaan yang memiliki peluang paling besar untuk menang. Di empat daerah yang diriset dan dimonitor, latar belakang pemenang adalah incumbent atau memiliki relasi (keluarga, bisnis, politik) dengan incumbent. Mereka umumnya adalah pengusaha lokal yang menjadi politikus.

Sebagai contoh di Banten. Pemenang adalah Ratu Atut Choisyah yang merupakan *incumbent*. Ratu Atut merupakan anak dari Tb.Chasan Shohib, pendiri PT.Sinar Ciomas perusahaan payung milik keluarga H.Chasan. Sebelumnya, dalam pemilukada di Pandeglang, ibu tiri Ratu Atut, Hj.Heriyani yang juga pengusaha sekaligus politikus terpilih menjadi wakil bupati.

Sedangkan di Pemilukada Jayapura, Walikota terpilih Benhur Tommy Mano sesungguhnya telah dipersiapkan oleh Walikota yang menjabat dua periode sebelumnya, Kambu. Bersama Rudi Maswe, pengusaha pendukung Benhur, mereka merupakan sejawat di Persipura Jayapura.

Kambu adalah ketua umum, Benhur kepala Panitia Pelaksana Pertandingan dan Rudi Maswe adalah manajer klub.

Berdasarkan kondisi tersebut tercermin bahwa peta politik di empat daerah tersebut sejak Pemilu 2005 belum berubah dan masih didominasi oleh elit lokal yang berupaya menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan politik dan ekonomi ataupun memperkuat bangunan ‘kerajaan baru’ di tingkat lokal.

Tabel 2. Hasil pemilu 2005 di empat daerah

Daerah	Pemilukada			Pemenang
	Pemenang	Perolehan Suara	Partai Pendukung	
Pandeglang	Erwar Kurtubi dan Hj. Heriyani	239.510 (43%) dan 265.263 (49,62%)	Partai Golkar, Demokrat, PKS, PKB, Hanura, PKPB, PPRN, PMB	<i>Incumbent</i> , ibu tiri Gubernur Banten
Jayapura	Benhur Tommy Mano dan Nur Alam	36.769 (29,13%) dan 55.753 (40,77%)	PKS dan PDIP	Birokrat dan memiliki hubungan dengan walikota lama
Kampar	Jefry Noor dan Ibrahim Ali	125,231 (45,85%)	Partai Demokrat, PAN, PKS	Mantan bupati 2001-2006, pengusaha dan anggota DPRD Provinsi
Banten	Atut Chosiyah dan Rano Karno	2.136.035 (49,65%)	Partai Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PKB, PAN, PBB, PPNU, PMB, PDP, PPRN, PKPU, PDS, PKPB, PPD, Partai Merdeka, PNI Marhaen, Partai Republikan, Partai Patriot, Partai Penegak Demokrasi	<i>Incumbent</i> dan wakil bupati Kabupaten Tangerang

Modal Pemenangan

Secara umum semua pasangan yang mencalonkan diri dalam pemilu 2005 di empat daerah menyatakan bahwa modal utama mereka untuk bertarung berasal dari kantong pribadi atau keluarga. Terlihat dengan jelas dalam laporan dana kampanye, sumber utama pemasukan semua pasangan calon di semua daerah berasal dari kantong mereka sendiri. Sisanya dari sumbangan perseorangan dan badan usaha.

Selain itu, kontribusi partai politik dalam pendanaan kampanye tidak terlihat. Kecuali untuk pasangan calon Jazuli Zuwaeni dan Makmun Muzaki dalam pemilu 2005 di Banten, pasangan calon lain di semua daerah tidak mendapat bantuan partai. Bahkan, berdasarkan hasil riset ICW, partai justru meminta uang perahu kepada pasangan calon yang hendak meminta dukungan. Jumlah uang yang mesti disetor bervariasi antara lain tergantung pada jumlah suara yang didapat partai dalam pemilihan legislative.

Jika dilihat dari modal kampanye, semua pasangan calon di semua daerah menyembunyikan total biaya kemenangan mereka. Total dana yang mereka laporkan terlalu kecil untuk menjadi modal bersaing menjadi bupati/walikota atau gubernur. Selain itu, bagi pasangan calon yang didukung

oleh perseorangan dan badan usaha, umumnya juga menyembunyikan identitas penyumbang. Temuan ICW sebagian besar penyumbang persorangan dan badan usaha adalah pengusaha spesialis proyek-proyek APBD.

menemukan paling tidak ada tiga modus manipulasi dana kampanye dalam pemilukada. *Pertama*, “alamat palsu”. Alamat penyumbang (perseorangan dan badan usaha) yang dicantumkan dalam laporan dana kampanye ternyata palsu. Antara lain tidak ada alamat yang dicantumkan dalam laporan, alamat ganda, alamatnya tidak jelas, atau ada alamat tapi nama perusahaannya ternyata tidak ada.

Kedua perusahaan/badan usaha yang menjadi penyumbang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menjadi persyaratan dalam menyumbang. Ketiga, penyumbang yang tidak layak menyumbang. Banyak pasangan calon yang memasukan ‘orang miskin’ sebagai penyumbang, bahkan jumlah sumbangannya di luar akal sehat. Misalnya di Provinsi Banten, salah satu penyumbang pasangan *incumbent* atas yang berasal dari Kota Serang ternyata supir pribadi salah satu pejabat di dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Tabel 3. Sumber penerimaan dana kampanye

No	Daerah	Sumber Penerimaan			
		Pasangan calon	partai	perseorangan	Badan hukum
PANDEGLANG					
1	Erwan Kurtubi-Heriyani	500.000.000			
2	Irna Narulita-Apud Mahpud	1.500.000.000		250.000.000	50.000.000
3	Edi Suhaedi-Aprilia Hedysanty	201.000.000		58.000.000	
KAMPAR					
1	Nasrun-Nizar	130.000.000			900.000.000
2	Burhanuddin – Zulher	808.000.000			1.250.000.000
3	Jefrie Noer-Ibrahim	892.200.000			
BANTEN					
1	Atut-Rano Karno	1.000.000.000		50.000.000	7.500.000.000
2	Wahidin Halim-Irna	12.901.835.750		197.680.000	1.548.800.000
3	Jazuli-Makmun	2.050.000.000	1.735.000.000	331.250.000	

Penggunaan Dana Negara (APBN dan APBD)

APBN dan APBD Provinsi maupun kabupaten kota dijadikan modal pemenangan pemilukada, terutama oleh *incumbent*. Sejak dalam perencanaan di Satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dana-dana tersebut diarahkan untuk kepentingan pemenangan. Dana hibah dan bantuan sosial merupakan dua program yang paling banyak dibajak

Secara umum penggunaan dana APBN/APBD diarahkan untuk dua tujuan. *Pertama*, peningkatan popularitas *incumbent*. Sebagai contoh dalam setiap acara seremoni pemberian atau pelaksanaan program/proyek bupati/walikota/gubernur meminta untuk dilibatkan, terutama proyek-proyek populis seperti pendidikan dan kesehatan gratis atau pembangunan/perbaikan gedung milik publik dan jalan raya.

Kedua, modal pemenangan. Dana APBD/APBN secara langsung diarahkan untuk mendukung pemenangan. Di Banten misalnya, gubernur memberikan dana hibah kepada lembaga-lembaga

miliki keluarganya seperti anak, suami, ipar, dan menantu. Juga ditemukan penerima fiktif dan jumlah uang yang diterima oleh lembaga lebih sedikit dibanding pagu yang telah ditetapkan. Contoh lain di Pandeglang, bupati melalui sekretaris daerah menyebarkan surat edaran yang meminta semua kepala sekolah dasar di Kabupaten Pandeglang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membuat baligo bergambar bupati lengkap dengan pesan kampanye mirip bupati.

Table 4. penggunaan dana negara

Keterangan	Pandeglang	Jayapura	Kampar	Banten
APBN	Mengintruksikan kepala sekolah agar menggunakan dana BOS untuk membuat baligo bupati dengan pesan pilkadinya			Pembagian beras raskin bantuan APBN yang ditambah stiker incumbent
APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Menahan dana <i>fresh money</i> desa yang tidak mendukung bupati - Meminta <i>kick back</i> dana <i>fresh money</i> Rp. 1 juta - Gubernur membagikan dana <i>fresh money</i> dan meminta agar kepala desa mendukung ibu tirinya 			<ul style="list-style-type: none"> - Menggulirkan dana hibah dan bantuan sosial kepala lembaga milik keluarga gubernur, lembaga fiktif, memotong dana hibah dan bansos - Menitipkan proyek di SKDP terutama humas untuk sosialisasi - Proyek di SKPD untuk kegiatan popularitas
APBD Kabupaten/ Kota	Titip program kampanye di SKPD	Me-mark down dana retribusi parkir dan minuman keras untuk modal pemenangan	Meningkatkan dana hibah/bansos dan digunakan untuk meningkatkan popularitas <i>incumbent</i>	Menahan dana <i>fresh money</i> yang kepala desanya mendukung lawan politik
Sumber lain	Dana CSR Bank Jabar untuk membeli sarung bergambar bupati			

Politisasi Birokrasi

Selain anggaran negara, birokrasi menjadi bagian penting dalam proses pemenangan pemilukada di empat daerah yang evaluasi dan monitor. Tidak hanya di Banten, Pandeglang, dan Kampar yang pertarungannya diikuti oleh *incumbent*, di Jayapura pun birokrasi dimobilisir untuk memenangkan calon yang didukung oleh walikora lama.

Banyak cara yang digunakan untuk memobilisir birokrasi untuk kepentingan pemenangan terutama *incumbent*. *Pertama*, adanya instruksi tertulis yang dibuat oleh bupati/walikota/gubernur guna menyukseskan pemilihan kepala daerah dengan pesan terselubung memenangkan *incumbent*. *Kedua*, pesan bersambung. Instruksi secara lisan oleh bupati/walikota/gubernur dan sekretaris daerah dilakukan secara berjenjang hingga birokrasi paling rendah.

Ketiga, rotasi birokrasi. *Incumbent* menempatkan orang-orangnya di SKPD-SKPD strategis seperti DPPKAD, pendidikan, dan kesehatan. *Keempat*, menambah intensitas pertemuan dengan SKPD. Posisi bupati/walikota/gubernur sebagai pembina birokrasi di daerah digunakan dengan maksimal. Kegiatan pembinaan dijadikan sebagai alasan untuk melakukan konsolidasi birokrasi untuk mendukung pemenangan.

Kelima, bupati/walikota/gubernur mendorong agar SKPD memperbanyak kegiatan-kegiatan populis seperti pembangunan gedung sekolah, menggratiskan sekolah, perbaikan jalan dan rumah ibadah. Dalam setiap kegiatan, terutama pembukaan, bupati/walikota/gubernur minta untuk dilibatkan dan mengklaim semua kegiatan tersebut sebagai prestasi kerjanya. *Keenam*, intimidasi. Birokrasi yang cenderung netral, apalagi mendukung lawan politik diintimidasi. *Ketujuh*, birokrasi dijadikan sebagai penyelenggara pemilihan seperti menjadi PPS atau PPK.

Pasca pemilukada, pemenang membersihkan birokrasi yang tidak mendukungnya. Di Banten, gubernur terpilih menon-job-kan beberapa pejabat daerah bahkan sebelum ia dilantik. Sedangkan di Pandeglang setidaknya ada 167 birokrasi dinon-jobkan, beberapa diantaranya sudah pindah ke provinsi atau daerah lain. Sanksi lain berupa mutasi dari posisi strategis seperti kepala dinas atau camat menjadi guru.

Tabel 5. modus politisasi birokrasi

Modus Mobilisasi Birokrasi
Semua acara SKPD sudah diarahkan untuk kepentingan pemenangan pemilukada
Semua kegiatan/acara SKPD harus melibatkan bupati/gubernur
Pertemuan dengan SKPD intensitasnya dibuat lebih sering yang disertai pesan untuk mendukung <i>incumbent</i>
Pesan berantai (menggunakan struktur birokrasi) untuk mendukung <i>incumbent</i>
Prioritas program/bantuan ditentukan oleh bupati/gubernur
Merotasi dan mutasi birokrasi
Briefing dan ancaman kepada birokrasi
Surat edaran instruksi untuk memenangkan bupati/gubernur
Pesan-pesan untuk memenangkan dalam setiap rapat birokrasi di semua level

Politik Uang

Pemilukada di semua daerah yang dievaluasi dan monitor terjadi praktek jual beli suara. Biasanya, menjelang H-1 pemilukada, pasangan calon memberi ‘bantuan’ berbentuk barang seperti kerudung, kalender, alat olahraga, kaos, dan sajadah. Sedangkan H-1 pemilukada hingga menjelang pemungutan suara, calon menyebarkan uang dan sembako. Dikenal dengan istilah ‘serangan fajar’. Tim sukses masing-masing pasangan calon mendatangi rumah calon pemilih, menghitung pemilih dan member uang atau sembako sebanyak total pemilih dalam rumah tersebut. Jumlahnya uang dan sembako yang diberikan oleh tim sukses pasangan calon berbeda-beda.

Contohnya di Jayapura. Politik uang dilakukan untuk kelompok masyarakat yang kemudian didrop di beberapa TPS. Karena kesamaan warna kulit, petugas sulit untuk menganalisis identitas mereka. Selain itu, modusnya juga langsung membeli pada kantong-kantong suara melalui

lembaga kesukuan, misalnya Keluarga Kerabat Selawesi Selatan (KKSS) ataupun lembaga masyarakat lain.

Operator politik uang adalah tim pemenangan yang dibentuk pasangan calon. Jumlah tim pemenangan tidak satu. Di Banten dan Pandeglang, pasangan calon membentuk tim pemenangan yang berasal dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, birokrasi, dan keluarga. Pengendalinya adalah tim dari keluarga. Untuk memudahkan kendali, dibentuk koordinator daerah (korda) pada tingkat kabupaten/kota/provinsi, koordinator kecamatan (korcam), koordinator desa (kordes), dan koordinator TPS. Tim memiliki struktur hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga memudahkan pembagian uang/barang dan kontrol.

Tabel 6. Modus dan aktor politik uang

Modus	Aktor
Pembagian uang secara langsung	Tim Sukses dan simpatisan
Pembagian sembako, mie, ikan.	Anggota partai, bagian dari partai, anggota dewan, dan bupati
Pemberian janji-janji	Calon
Pemberian kerudung, sajadah, helm dan berbentuk pakaian yang lain	Aparatur pemerintahan (Camat, Lurah, RT,RW, dan PNS)
Pemberian uang pada Kepala Desa, TPS, tempat ibadah	Lain-lain (Organisasi profesi, masyarakat umum, dan tidak jelas)
Pengobatan gratis	Istri, anak dan yang mempunyai kekerabatan
Pemberian insentif bagi tokoh masyarakat, agama	
Mentraktir makan secara massal warga	
Mobilisasi massa melalui truk dan disebar ke sejumlah TPS	

Penyelenggara Tidak Netral

Salah satu kunci kemenangan dalam pemilu ada pada penyelenggara baik KPU maupun Panwas. Karena itu, semua pasangan berupaya mempengaruhi penyelenggara dari tingkat atas hingga paling bawah seperti PPS dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Caranya dengan menempatkan orang-orang pasangan calon di kedua lembaga tersebut atau mempengaruhi mereka dengan politik uang atau iming-iming jabatan

Akibatnya KPU dan panwas tidak lagi independen. Di Pandeglang, tidak banyak temuan pelanggaran yang diperoleh panwaslu. Padahal jika melihat realitas di lapangan dan laporan tim sukses dalam sengketa di MK, banyak terjadi pelanggaran sebelum dan pada saat pemilihan. Selain itu, berdasarkan pengakuan tim sukses pasangan calon, mereka mesti membayar panitia penyelenggara dan pengawas pemilu untuk mengamankan posisi.

Sedangkan di Jayapura, kondisi penyelenggaraan lebih parah. KPU Jayapura dinilai tidak netral, Ketua KPU dan Panwas pada pemilu 2010 menjadi tersangka suap untuk meloloskan pasangan *incumbent*. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab pemilu Kota Jayapura diulang. Parahnya lagi pengganti ketua KPU ditemukan adalah salah satu tim sukses pasangan pemenang dalam Pemilu Kota Jayapura.

Tabel 7. Penyelenggara tidak independen

No	Modus
1	Membrief atau memfasilitasi pasangan calon tertentu untuk meminta dukungan anggota PPK
2	Makan bersama dan berkunjung ke rumah pasangan calon kepala daerah
3	Stiker sosialisasi menggiring pemilih memilih pasangan tertentu
5	Menghilangkan hak pilih pendukung pasangan tertentu
6	Meloloskan pemilih yang tidak terdapat di DPS dan DPT
7	Menambah suara pasangan tertentu
8	Tidak membersihkan media kampanye pasangan tertentu
9	Tidak menindaklanjuti laporan dari pasangan calon tertentu

Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan di atas, ada beberapa kesimpulan dari hasil riset evaluasi dan monitoring di Kabupaten Pandeglang, Kota Jayapura, Kabupaten Kampar, dan Provinsi Banten:

1. Secara prosedural, pemilu-kada ternyata belum berjalan dengan demokratis. Berbagai manipulasi masih dilakukan untuk mempengaruhi pemilih. Pemilu-kada justru menjadi ajang bagi elit lokal untuk membajak proses demokratisasi melalui berbagai praktek korupsi, baik yang terbuka maupun yang terselubung.
2. Sumber daya lokal (*state resources*) seperti APBD dan APBN sangat rentan digunakan oleh calon, terutama *incumbent* untuk kepentingan kemenangan melalui berbagai macam program populis.
3. *Incumbent* mempolitisasi birokrasi dengan menjadikannya sebagai ‘tim pemenang’ pemilu-kada.
4. Para pengusaha berkepentingan untuk turut membiayai pasangan calon terutama yang berpotensi menang dengan tujuan beragam. Para pengusaha yang selama ini mendapatkan proyek-proyek dari kebijakan APBD kepentingannya adalah berupaya agar mereka tetap bisa menjaga dan mempertahankan kebijakan tersebut tetap memberikan keuntungan serta berpihak pada bisnis mereka. Sementara para pengusaha dari non-APBD kepentingannya adalah untuk memperoleh lisensi dan monopoli serta pengembangan bisnis.
5. Jual beli suara (*vote buying*) masih marak digunakan sebagai strategi pragmatis dalam memperoleh suara.
6. Pasangan calon mempengaruhi penyelenggara seperti KPU dan Panwaslu dengan menempatkan orang-orangnya atau menyuap. Akibatnya, penyelenggara tidak netral dan kinerjanya buruk.

Rekomendasi

Oleh karena itu, ada beberapa rekomendasi guna memperbaiki pemilu-kada dalam rangka mewujudkan demokratisasi di daerah.

1. Menutup ruang membajak *state resources* dengan mendorong cuti panjang bagi *incumbent* yang hendak kembali mencalonkan menjadi kepala daerah.
2. Adanya moratorium program hibah dan bantuan sosial di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pemilu-kada

3. Adanya sanksi bagi pasangan calon yang menerima sumbangan dana kampanye di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang
4. Mendorong penegakan hukum korupsi untuk mencegah praktek-praktek korupsi politik dalam pemilu, diantaranya penyalahgunaan kekuasaan dana fasilitas negara serta adanya penggunaan dana-dana haram dalam pemilu.
5. Dalam membangun pemilu yang berintegritas maka penting untuk menjaga independensi penyelenggara dan pengawas, menindak tegas pelaku pelanggaran baik administratif dan pidana pemilu serta menutup ruang terjadinya praktek penggunaan sumber daya publik sebagai instrumen pemenangan. Perlu difikirkan secara lebih serius, bagaimana mendesain KPUD dan Panwaslu agar tetap independen dalam menjalankan fungsinya.
6. Meningkatkan edukasi politik kepada pemilih agar mereka tidak selalu menjadi objek dalam Pemilu sekaligus membangun posisi tawar terhadap para kandidat.
7. Mendukung langkah Kementerian dalam negeri untuk mengatur tentang “mahar politik” dan aspek *governance* lainnya dalam proses pencalonan kandidat kepala daerah.
8. Mendorong adanya pembatasan pengeluaran/pembelanjaan dana kampanye dalam RUU Pemilu
9. Mendorong adanya larangan calon tersangka sebagai calon kandidat pemilu